

TANGANI STUNTING, PEMPROV JATENG DIGANJAR RP5,97 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2023/10/stunting-jawa-tengah.jpg>

Isi Berita:

Solopos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) mendapatkan hadiah insentif fiskal Rp5,97 miliar untuk penanganan stunting. Dana itu juga sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Pemprov Jateng dalam kinerja menurunkan angka stunting di wilayahnya.

Penghargaan itu diberikan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, didampingi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana, di Istana Wakil Presiden, Jumat (6/10/2023).

Wapres Ma'ruf Amin mengucapkan selamat kepada seluruh daerah yang menerima penghargaan itu. Penghargaan itu harus menjadi pemacu dalam menurunkan angka stunting di wilayahnya.

“Saya berharap insentif dan penghargaan ini, bukan semata tujuan akhir daripada Saudara-saudara dalam bekerja, melainkan menjadi pemicu untuk berkontribusi lebih besar lagi,” pesan Wapres dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com dari Pemprov Jateng, Jumat malam.

Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting Indonesia di tahun 2022 sebesar 21,6%. Angka ini turun signifikan dari tahun 2018 yang berada di angka 30,8%.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama yang tentu kita syukuri. Namun saya minta, kita tidak boleh berpuas diri karena masih ada target yang harus kita kejar, yaitu prevalensi stunting 14% di tahun 2024,” kata Wapres.

Untuk mencapai target prevalensi 14%, lanjutnya, tantangannya tidaklah ringan. Terlebih, tahun depan adalah tahun politik. Maka, pekerjaan rumah hari ini adalah memastikan bagaimana pergantian tampuk kepemimpinan di pusat dan di daerah tetap mengakomodasi percepatan penurunan stunting, sebagai prioritas pembangunan.

Menurut Wapres, pelajaran dari pelaksanaan program penurunan stunting selama empat tahun terakhir, menunjukkan bahwa komitmen politik yang tinggi dari para pemimpin di pusat dan di daerah.

Komitmen politik, kata Wapres, akan membantu memastikan adanya mobilisasi sumber daya yang diperlukan, juga mendorong perbaikan koordinasi di lapangan, dan implementasi pelaksanaan program, agar lebih tepat sasaran.

“Oleh karena itu, saya minta kepada Saudara-saudara pejabat gubernur, bupati/ wali kota, serta seluruh organisasi perangkat daerah [OPD], untuk betul-betul mengawal pelaksanaan program tahun depan. Sekaligus memastikan penurunan stunting tetap menjadi program prioritas, pada saat transisi pemerintahan nanti,” kata Wapres.

Angka Stunting di Jateng

Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dirilis Kementerian Kesehatan (Kemenkes), angka stunting di Jawa Tengah masih tergolong tinggi, yakni 20,8 persen atau mengalami penurunan sekitar 0,1 persen dibandingkan tahun 2021 lalu.

Hal itu membuat Jateng menjadi provinsi dengan angka stunting tertinggi di Pulau Jawa. Sementara itu provinsi di Pulau Jawa dengan angka stunting terendah ditempati DKI Jakarta dengan 14,8 persen atau turun 2 persen dibandingkan tahun 2021.

Kemudian disusul DI Yogyakarta dengan angka stunting pada 2022 mencapai 16,4 persen dari sebelumnya 17,3 persen, Jawa Timur (Jatim) dengan 19,2 persen atau turun dari sebelumnya 23,5 persen. Kemudian Banten dengan 20 persen, atau turun dari sebelumnya 24,5 persen, dan Jawa Barat (Jabar) yang di angka 20,2 persen atau turun dari sebelumnya 24,5 persen.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.solopos.com/tangani-stunting-pemprov-jateng-diganjar-rp597-miliar-1760900>, “Tangani Stunting, Pemprov Jateng Diganjar Rp5,97 Miliar”, tanggal 6 Oktober 2023.

2. https://www.rri.co.id/daerah/390056/pemprov-jateng-terima-hadiah-insentif-rp-5-97-miliar?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=general_campaign, “Pemprov Jateng Terima Hadiah Insentif Rp 5,97 Miliar”, tanggal 7 Oktober 2023.

Catatan :

- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua tahun 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar. Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.¹
- Insentif fiskal diberikan sebagai bentuk apresiasi dan upaya untuk memacu kinerja pemda. Pengalokasian insentif untuk pengendalian inflasi dilakukan beberapa kali ditujukan supaya peningkatan kinerja dapat terus dimonitor dan kinerjanya dapat langsung diapresiasi. Selain itu, penggunaannya bisa digunakan untuk pengendalian inflasi periode.²
- Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten. Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.³
- Secara keseluruhan, insentif fiskal tahun anggaran 2023 sebesar Rp8 triliun yang dibagi menjadi 2 bagian. Sebanyak Rp4 triliun diberikan atas kinerja tahun 2022 yang terdiri dari Rp3 triliun untuk daerah berkinerja baik dan Rp1 triliun untuk daerah tertinggal yang berkinerja baik.⁴

¹ <https://setkab.go.id/pemerintah-beri-insentif-fiskal-bagi-daerah-yang-sukses-kendalikan-inflasi/>

² Ibid

³ Ibid

⁴ Ibid

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023, diatur sebagai berikut:
 1. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ a tau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/ atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional.
 2. Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan yang selanjutnya disebut Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan adalah Insentif Fiskal yang diberikan kepada pemerintah daerah yang berkinerja baik di tahun berjalan.
 3. Pasal 2 menyatakan bahwa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023 dialokasikan sebesar Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi